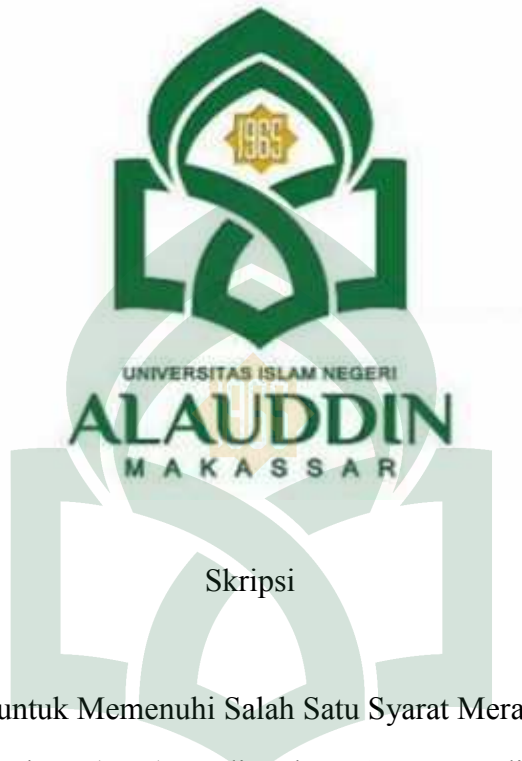


**PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan
Kekeluargaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UMMU KALSUM
NIM: 10100113146

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Kalsum

NIM : 10100113146

Tempat/Tanggal Lahir : Kolaka/25 September 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan

Fakultas/Program : Syariah dan Hukum

Judul : Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata, 18 Mei 2017

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,



Ummu Kalsum
10100113146

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A”, yang disusun oleh Ummu Kalsum, NIM: 10100113146, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Mei 2017 M
21 Sya’ban 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Patimah, M. Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri, AR., M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. M. Jamal Jamil, M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.
NIP. 19621016199031003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله اللهم صل وسلم على محمد و على آل

و اصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dari kebenaran-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta orang-orang bijak yang takkan pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan harapan demi terciptanya damai bagi umat manusia di muka bumi.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam menyusun skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun harapkan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusun tak bisa bersandar hanya kepada pengalaman diri sendiri, sebab alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berkat kesabaran orang-orang yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penyusun ingin menghaturkan rasa hormat, maaf, dan terima kasih terdalam kepada:

1. Bapak Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku ketua jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

3. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag. Dan Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M. Ag. Selaku pembimbing I dan II, yang telah mengarahkan, membimbing, dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Selaku Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan ilmunya tentang kebaikan dan kebenaran. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti.
5. Ibu Nurfiah Anwar, selaku “Kakak dan Ibu” bagi penyusun selama di Makassar, yang selalu mengarahkan dan mengajarkan tentang agama dan berperilaku yang baik.
6. Ibu dan Bapak tercinta, yang selalu mengiringi langkah penyusun dengan doa, nasehat, dan cinta. Kasih sayangmu abadi dan tidak dapat tergantikan oleh apapun.
7. Sahabatku Kasmanita yang selalu menemani penyusun mulai dari kuliah perdana di kampus UIN Alauddin hingga pembuatan dan selesainya skripsi ini, dan sahabat-sahabatku lainnya yang turut membantu penyusun dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Peradilan Agama C yang telah membantu dan menemani penyusun selama kuliah dan menyusun skripsi ini.
9. Tak lupa untuk seseorang yang selalu mendampingi dalam menyusun skripsi ini maupun hal lainnya hari ini, esok, dan selamanya.

Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu setiap tegur sapa dari berbagai pihak, merupakan bagian dari diskusi demi perbaikan karya ini. Namun demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Makassar, 21 Sya'ban 1438 H
18 Mei 2016

Penyusun

Ummu Kalsum



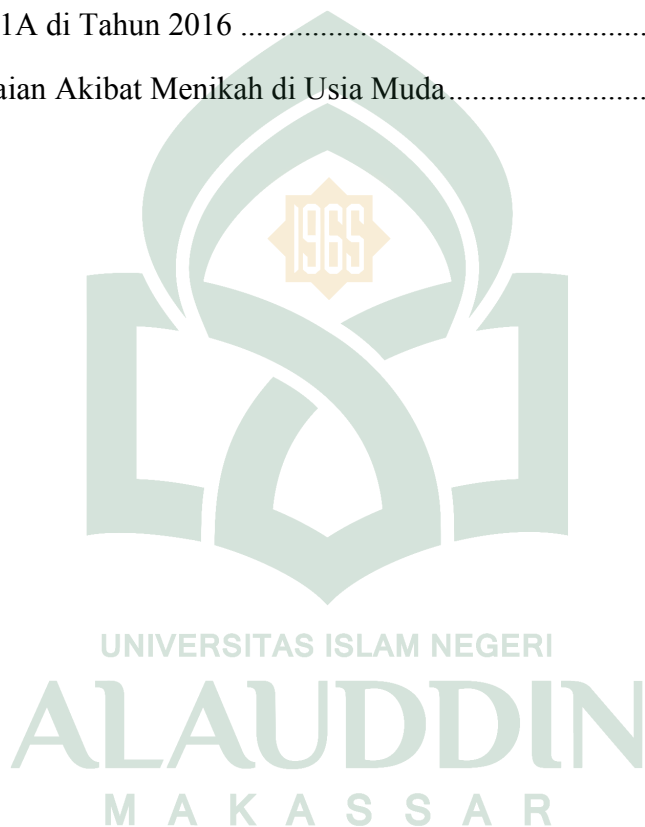
DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERISASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Konsep Dasar Pernikahan	12
B. Larangan-larangan dalam Pernikahan.....	18
C. Pengertian Dispensasi Nikah.....	22
D. Batas Usia Pernikahan	24
E. Faktor Pernikahan Terjadinya Permikahan Dini.....	31

F. Dampak Usia Dini terhadap Kesehatan	36
G. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B	49
B. Faktor-Faktor yang Mendasari dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim mengenai Dispensasi Nikah	54
C. Fenomena Tingkat Perceraian Usia Dini di Pengadilan Agama Watampone	63
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2016	54
Tabel 4.2: Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pada Tahun 2016	62
Tabel 4.3: Persentase Alasan Percerain di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A di Tahun 2016	64
Tabel 4.4: Perceraian Akibat Menikah di Usia Muda.....	67



PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamza h	,	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>Damma</i>	U	u

C. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifah

هَوَّلَ: haula

D. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

E. Ta'marbutah

Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

G. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

H. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

J. Lafz al-Jalalah (ﷲ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ﷲ دينٌ *Dinullah billah*

Adapun ta'marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

ﷲ فِي رَحْمَةِ ﷲ *Hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahrul ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

ABSTRAK

Nama : Ummu Kalsum

NIM : 10100113146

Judul : Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A

Skripsi ini berkaitan dengan dispensasi nikah dan perceraian yang menikah di usia dini. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1B? pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone? 2) Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini?

Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis, normatif, dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen yang digunakan ialah pedoman wawancara, dokumentasi, dan alat tulis. Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa telah sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan Agama itu sendiri, tidak adanya larangan dalam pernikahan, telah matang dari segi sikap, fisik, maupun finansialnya, tidak adanya paksaan dari pihak manapun

untuk segera menikah, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan pertimbangan masalah mursalahnya. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik hukum (dalam pengertian yang sempit).¹

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam itu juga berbeda dengan fenomena hukum-hukum yang ada. Karena itu dalam kajian hukum Islam sangat diperlukan sekali mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.²

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua

¹Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 1.

²H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 18.

orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.³

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas. Generasi

³Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, h. 16-17.

itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Namun jika hal itu terjadi maka tentulah harapan yang diinginkan tidak dapat terwujud. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya kawin pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa. Boleh jadi umur mereka ketika memasuki dunia perkawinan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau bahkan usia yang lebih muda lagi.

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mendorong suatu analisa untuk mengkaji pengaruh dampak dispensasi nikah terhadap perceraian di pengadilan agama. Dari pengkajian itu, perlunya memperhatikan usia bagi calon suami istri sebelum memasuki pernikahan, meskipun di satu sisi keinginan keduanya untuk melangsungkan pernikahan, tapi di sisi lain adanya dampak yang terjadi akibat pernikahan dua generasi yang belum matang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Dampak Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone?. Kemudian sub-masalah yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone?

2. Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watampone?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan agar terfokus pada rumusan masalah, maka dibuatlah suatu deskripsi fokus penelitian. Deskripsi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- Peneliti hanya berfokus pada permohonan dispensasi nikah yang telah dikabulkan dan kemudian mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
- Peneliti hanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A.
- Peneliti hanya mengambil informasi dari data dan orang-orang yang bertugas di Pengadilan Agama Watampone.

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam judul ini mengenai dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone, maka peneliti membatasi makna judul tersebut ke dalam dekripsi fokus penelitian sebagai berikut:

a. Dispensasi nikah

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 bahwa batas usia pernikahan bagi pria ialah telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah berumur 16 tahun. Dan jika terjadi penyimpangan pada hal tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain di daerah tempat tinggal pihak yang ingin mengajukan dispensasi.

Meskipun legal dispensasi nikah ini dianggap sebagai kemunduran kualitas hidup remaja yang lebih baik. Pernikahan di usia dini rentan terhadap berbagai masalah karena sikap mereka yang belum mampu untuk menghadapi kenyataan yang lebih rumit dari kehidupan remaja yang pada umumnya belum tersentuh dengan dunia perkawinan. Diantaranya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rentan terhadap berbagai penyakit reproduksi wanita karena kesiapan tubuhnya yang belum sempurna, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, banyaknya perceraian akibat ketidaksiapan mental remaja menghadapi dunia perkawinan, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi pernikahan di usia dini.

Penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah secara umum. Yang tertuju hanya pada ruang penelitian Pengadilan Agama Watampone itu sendiri. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengenai alasan-alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

b. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba-in”, yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.⁴

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2006), h. 189.

Berdasarkan penelitian awal bahwa tingkat perceraian di pengadilan agama watampone pada tahun 2016 berjumlah kurang lebih 1200 kasus perceraian. Itu berarti tingkat perceraian di daerah Watampone terjadi cukup banyak. Di antara kasus-kasus itu mereka bercerai pada usia yang cukup muda, sehingga menunjukkan bahwa pernikahan mereka terjadi di usia yang belum genap 19 atau 16 tahun.

Sehubungan dengan hal itu, maka terjadinya pernikahan di usia dini karena adanya dispensasi nikah yang cukup banyak dikabulkan di pengadilan agama Watampone. Sehingga karena ketidaksiapan mental mereka, beberapa dari pernikahan tersebut akhirnya tidak bisa dipertahankan dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang masih sangat muda.

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini. Setelah melakukan telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi kawin. Kajian pustaka yang ditemukan berupa buku maupun skripsi terdahulu.

Mengenai pernikahan usia dini dapat dilihat dalam buku yang berjudul “Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan” oleh H. Andi Syamsu Alam yang dibuat pada tahun 2005. Dalam buku tersebut membahas tentang usia perkawinan yang ideal untuk membangun masyarakat Indonesia yang dicita-citakan adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Argumentasinya adalah sekufu dalam bahasa fikih yakni sebanding usia, kematangan psikologis, kecenderungan social, juga kesarjanaan (pendidikan), bahkan mendukung terbinanya *keluarga sakinah mawaddah warahmah*.⁵

⁵H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. h. 128-129.

Buku yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini” yang dibuat oleh Moh Fauzil Audim pada tahun 2002. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang pentingnya penerapan pernikahan dini dan alasan yang mendukung pelaksanaan pernikahan dini. Penulis menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pelaksanaan dari ajaran nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk segera menikah, selain itu menikah dapat mencegah dari perbuatan maksiat.⁶

Mengenai usia pernikahan dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷ Dan mengenai adanya dispensasi nikah terhadap pihak-pihak yang masih di bawah umur, dapat dilihat dalam lanjutan ayat tersebut yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga jika salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur yang hendak melaksanakan perkawinan dapat mengajukan Dispensasi Nikah melalui pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melewati beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Adapun dalam skripsi, terdapat judul “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)” yang ditulis oleh Solechan pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan usia dini adalah karena orang

⁶Moh Fauzil Audim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 94.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 7, ayat 1.

tua khawatir anaknya melakukan zina.⁸ Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan di Pengadilan Agama karena calon mempelai wanita telah bermalam tiga kali di rumah calon mempelai pria. Dan adapun alasan majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan tersebut adalah agar demi kemaslahatan para pihak dan untuk mencegah terjadinya tindakan yang lebih merugikan baik bagi calon mempelai pria dan wanita maupun keluarga yang terlibat.

Skripsi yang ditulis oleh Dana Kristiyanto yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi’i”. Peneliti mengungkapkan bahwa dalam UU perkawinan batas usia perkawina telah ditentukan dan berlaku untuk semua masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia perkawinan tersebut, maka jika akan mengajukan perkawinan dapat meminta permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan dalam pandangan madzhab syafi’I dan ulama fikih lainnya memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia *baligh* dan *tamzi*, sementara syarat dan usia nikah telah terpenuhi.⁹

Skripsi yang disusun oleh Musdalifa yang berjudul “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa” pada tahun 1998. Peneliti menjelaskan bahwa undang-undang perkawinan ada yang bertentangan

⁸ Solechan, “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁹Dana Kristiyanto, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi’I”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dengan bunyi-bunyi pasal dan ada pula pasal yang mendukung perceraian akibat perkawinan usia dini, dan dalam hukum Islam, perceraian dianjurkan bagi pasangan usia muda jika tidak ada lagi jalan untuk mereka bersatu, maka sebelum diajukan perceraian Islam mengajarkan untuk melakukan Islah (damai).¹⁰

Skripsi yang dibuat oleh Hendra Fahrudin Amir dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Peneliti menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dispensasi nikah oleh hakim secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun pertimbangan hukum secara normatif adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik kedua orang tua dari pihak mempelai pria dan wanita, juga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Serta pertimbangan majelis hakim mengenai hukum dispensasi nikah berdasarkan dalil-dalil syara’.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Nursyamsi pada tahun 2007 yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan dampak yang Ditimbulkan Menurut Tujuan Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kurangnya pemahaman masyarakat Poso tentang dampak dari pernikahan usia muda dan faktor-faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan usia muda.¹²

¹⁰Musdalifa, “Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa”, *Skripsi* (Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998).

¹¹Hendra Fahrudin Amir, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

¹²Nursyamsi, “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum islam)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007).

Studi kasus yang diteliti oleh Qury Orchid pada tahun 2013 dengan judul “Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)”. Membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum.¹³

Skripsi yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)” oleh Abdul Munir pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dampak dispensasi terhadap eksistensi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal secara tidak langsung tidak berdampak pada eksistensi pernikahan akan tetapi lebih berdampak pada keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁴ Hal ini berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada dampak dispensasi perkawinan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan penyusun teliti. Meskipun memiliki kesamaan mengenai objek yang sama tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak permohonan

¹³ Qury Orchid, *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)*, [http:// www.repository.unhas.ac.id.html](http://www.repository.unhas.ac.id.html) (4 Juli 2013).

¹⁴ Abdul Munir, “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2011).

dispensasi nikah yang dikabulkan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui fenomena perceraian terhadap perkawinan usia muda yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi kawin.
- b. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi nikah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab **نكح – ينكح – نكاحا** yang secara etimologi berarti menikah (**التزوج**). Dalam bahasa Arab lafazh nikah bermakna berakad (**العقد**), bersetubuh (**الوطء**), dan bersenang-senang (**الاستمتاع**). Di samping itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah **زوج**, dari asal kata **الزوج** yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.¹ Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).²

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam hanBuruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 31.

²Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 9 – 10.

Sedangkan nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu:

1. Menurut M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., nikah adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.³
2. Menurut *Najmuddin Amin al-Kurdi*, memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadh nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.⁴
3. Menurut Abdul Muhaimin As'ad, berpendapat bahwa nikah ialah akad antara caon suami isteri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁵

Para ulama juga memiliki pendapat masing-masing mengenai pernikahan, di antaranya:

1. Ulama Hanafiah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunkan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

³M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 249.

⁴Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th., h. 338.

⁵Sabri Samin, *Fiqih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafat *nikah* mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.

Adapun menurut undang-undang pengertian pernikahan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakan kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

Kedua: digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertamunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

⁶Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 83-84.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁷

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki yang membolehkan dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40.

⁸Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 2.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 40-41.

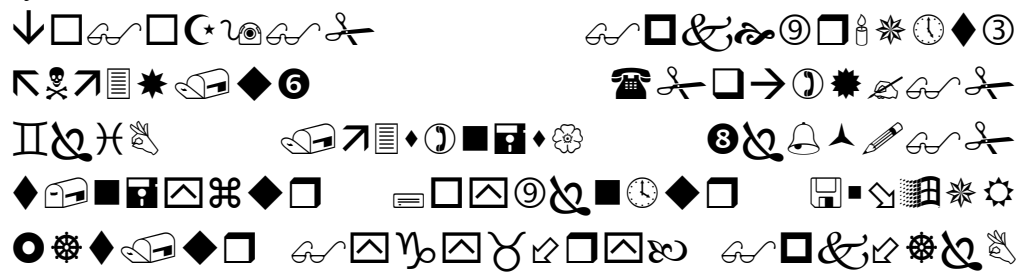
perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

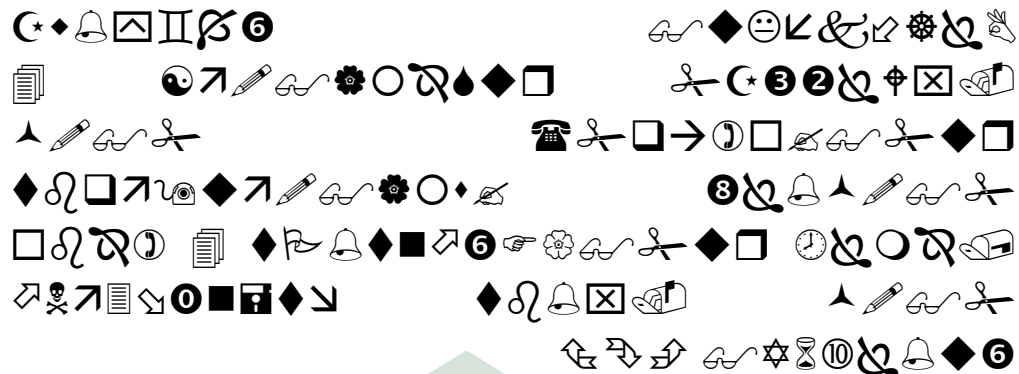
Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qura'n atau yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Adapun tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat yang tertera dalam Q.S. an-Nisa/4

ayat 1:





Terjemahnya:

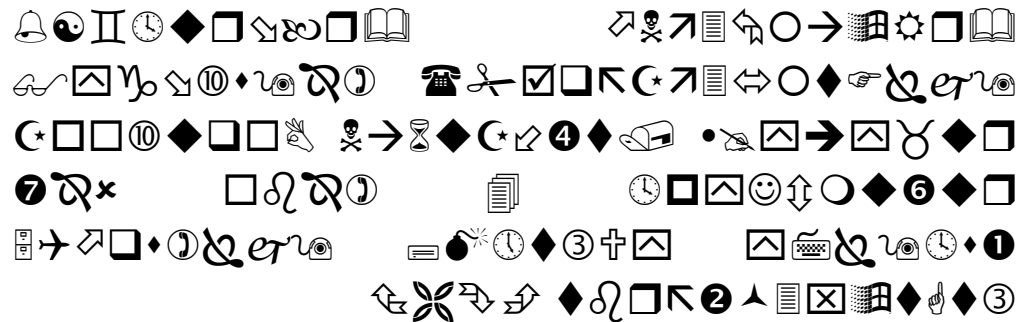
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.¹⁰

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gazirah umat manusia bahkan juga gazirah bagi bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30 ayat 21:



¹⁰Kementrian Agama R. I., Al-Qur'an terjemahnya Surah an-Nisa/4: 21 (Jakarta: Toha Putra, 2008).



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan dari jenis kalian wanita sebagai pasangan hidup bagi kalian, **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” Jika Allah menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya jenis lain seperti jin atau hewan, niscaya tidak keserasian dan kesesuaian di antara pasangan-pasangan itu.

Selanjutnya, di antara kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah bahwa Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang.

Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita terkecuali karena:

1. Rasa cinta dan kasih sayang yang terbukti dengan lahirnya anak dari rahim istrinya.

¹¹Kementrian Agama R. I., *Al-Qur'an terjemahnya* Surah ar-Rum/30: 21

2. Sang isteri membutuhkan nafkah darinya.
3. Ingin menciptakan rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya.¹²

Selain itu penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat ditempuh melalui jalur perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan(dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan menekang syahwat.¹³

B. Larangan-larangan dalam Pernikahan

¹²Muslimah, *Tafsir QS. Surat Ar-Rum Ayat 21 "Allah Menciptakan Pasangan Untuk Tujuan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah"*, [http:// www.anacilacap.blogspot.co.id/2017/05/tafsir-qs-surat-ar-rum-ayat-21-allah.html](http://www.anacilacap.blogspot.co.id/2017/05/tafsir-qs-surat-ar-rum-ayat-21-allah.html) (11 Juli 2017)

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-48.

Pernikahan yang hendak dilaksanakan selain harus terpenuhi syarat-syarat pernikahan juga tidak boleh ada larangan dalam pernikahan tersebut. Adapun larangan-larangan tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.¹⁴

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁵

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

¹⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 20.

¹⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1.

Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁶

Selain itu larangan perkawinan juga diatur dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al-dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

¹⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10.

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu atau keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'i ataupun seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tadi telah kawin

dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷ Hal ini merupakan larangan yang jelas hukumnya haram.

C. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁸ Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat:

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.²⁰ Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

¹⁷Kementrian Agama R. I., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 39-44.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 335.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 962.

²⁰Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32.

Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²¹ Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.²²

²¹Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 33.

²² Akrom Hazami, "Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)", www.murianews.com (8 April 2017).

D. Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Perkawinan usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”²³

Usia pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam undang-undang perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

(2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab II, pasal 7, ayat 1.

- (3) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)”²⁴

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”
- (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”²⁵

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab III, pasal 7, ayat 2 dan 3.

²⁵Kementrian Agama R. I., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 15, ayat 1 dan 2.

masih di bawah umur.²⁶ Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, juga mengatur tentang batas usia pernikahan yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) dan (2):

- (1) “Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.”
- (2) “Permohonan dispensasi bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.”²⁷

2. Batas Usia Pernikahan Menurut *Fiqh*

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmunan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu.

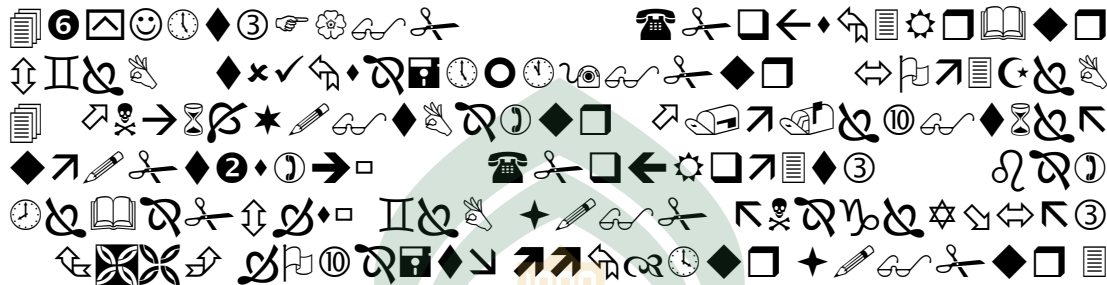
Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

²⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.

²⁷ Kementrian Agama R. I. “Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam,” dalam Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 191.

Beberapa pendapat para ulama dalam konteks fikih munakahat mengenai usia pernikahan, di antaranya:

Usia pernikahan menurut pandangan Sayid Sabiq mengacu pada firman Allah dalam QS. an-Nur/24: 32, yang berbunyi:



Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁸

Berdasarkan ayat tersebut yang tertera dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang terkait dengan ayat ini tertera pada ayat berikutnya dalam Qur'an Surah an-Nur/24 ayat 33.

Adapun tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa bagi para wali atau para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan *kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian di antara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan

²⁸Kementrian Agama R. I., Al-Qur'an terjemahnya, Surah an-Nur/24: 32.

kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui* segala sesuatu.²⁹

Dari kandungan ayat ini, Sabiq berpendapat bahwa kemampuan untuk kawin relatif ditentukan oleh aspek kewajiban, setelah itu baru aspek kebutuhan sosial ekonomi. Untuk itu, kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh batas usia tertentu, namun jelas harus memiliki kematangan psikologis sehingga masing-masing suami isteri harus memahami tanggung jawab dan perannya. Kesimpulannya bahwa pandangan ini secara kritis menempatkan faktor usia matang berkisar dua puluh tahun. Artinya pada usia ini, masih *debatable* sifatnya, kematangan psikis dan fisik mulai nampak pada tingkat perkembangan mental mencapai kedewasaan.³⁰

Menurut penulis bahwa ayat ini berkaitan dengan agar para wali hendaknya menikahkan laki-laki atau perempuan dari mereka yang telah layak untuk menikah. Ayat ini juga berkaitan dengan perintah untuk segera menikah ketika ia telah mampu dari segi sikap dan mental untuk menikah, bukan ditentukan karena usia mereka. Bahkan ayat ini menjelaskan pula seseorang yang telah mampu untuk menikah untuk tidak takut akan kehidupan pernikahan akan kemampuan mereka dalam menghidupi keluarganya karena sungguh Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Pada prinsipnya, keterangan ini juga secara jelas menentukan usia tertentu untuk kawin, namun dari uraian Andi Syamsu Alam memahami bahwa kematangan usia dan kesiapan mental itulah yang sangat penting. Secara psikologis matang dan siap mental berkisar pada usia dua puluh lima tahun, sehingga calon suami isteri

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 335.

³⁰Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, h. 54.

dapat memahami signifikan perkawinan secara tepat. Lebih dari itu, Shihab mengintrodusir secara lugas bahwa, karena hubungan seks itu bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dalam suasana bersih, tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau situasi kekotoran.³¹

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.³²

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.

³¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, h. 55-56.

³²Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998) h. 35.

- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³³

Berdasarkan pandangan-pandangan ulama di atas menunjukkan perbedaan pendapat mengenai batas usia memasuki dunia pernikahan. Para ulama berpendapat tidak secara rinci menerangkan usia ideal pernikahan, tetapi lebih menonjolkan kesiapan seseorang dalam menghadapi pernikahan, baik kematangan fisik, psikis, maupun kemampuan dalam ekonomi.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Melihat fenomena yang ada di masyarakat belakangan ini begitu banyak pernikahan dini yang terjadi. Remaja-remaja yang semestinya menikmati masa mudanya, justru harus berhadapan dengan urusan rumah tangga. Banyak alasan yang menyebabkan begitu maraknya pernikahan usia dini di kalangan masyarakat, baik itu karena seks bebas, hamil di luar nikah, maupun pengaruh dari lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini. Dalam al-qur'an maupun hadis tidak ada yang menegaskan tentang pernikahan usia dini. Namun dalam hukum Allah melarang adanya hubungan yang begitu dekat antar pria dan wanita yang bukan muhrimnya di luar perkawinan, atau dapat dikatakan dengan zina. Padahal dalam agama menjelaskan untuk memelihara

³³ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994) h. 3-4.

dan melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk dalam hal ini membatasi anak dari pergaulan bebas sehingga mencegah dari perzinahan.

Kurangnya pemahaman agama dapat menyebabkan anak lebih mudah bergaul dengan lawan jenisnya hingga di luar batas. Anak yang sudah melewati batas dalam bergaul dalam hal ini telah melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya, membuat para orang tua khawatir dengan kondisi anaknya yang demikian, sehingga memutuskan untuk lebih baik menikahkan anaknya dibanding mereka harus terjebak ke dalam pergaulan bebas, atau dengan tanpa mempertimbangkan kesiapan anak memasuki dunia pernikahan atau tidak.

2. Faktor Keluarga

Faktor orang tua merupakan faktor adanya pernikahan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan dipilihnya sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.³⁴

Maraknya seks bebas di kalangan remaja, membuat para orang tua takut akan pergaulan anak mereka. Sehingga salah satu jalan yang mereka gunakan ialah menikahkan anaknya, meskipun tidak semua orang berpikir demikian.

³⁴Syamsumarling, "Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene), *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 63.

Remaja yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan oleh keluarga untuk meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan, meskipun keduanya masih menempuh jalur pendidikan.

Selain itu, salah satu alasan keluarga menikahkan anaknya di usia yang sangat muda yaitu karena mereka tidak begitu peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa anak yang telah lulus SMP atau bahkan baru lulus dari bangku sekolah dasar, sudah cukup mampu untuk memasuki dunia pernikahan dan mencari rezeki sendiri. Keadaan ini terjadi biasanya pada orang tua yang memiliki pendidikan yang kurang, keadaan ekonomi yang lemah, atau bahkan sudah menjadi tradisi keluarga mereka.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan baik orang tua maupun anak, dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya dalam pernikahan. Jika orang tua memiliki pendidikan yang kurang, kemungkinan mereka cenderung untuk menikahkan anaknya di usia yang cukup muda. Hal itu dikarenakan orang tua kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari pernikahan yang akan timbul di kemudian hari karena ketidaksiapan jiwa, psikis, maupun fisik seorang anak. Apalagi jika anak perempuan mereka sudah sangat dekat dengan teman prianya, kekhawatiran mereka semakin besar sehingga para orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka.

Pendidikan yang rendah pada seorang anak juga dapat memungkinkan terjadinya pernikahan usia dini. Tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Namun faktor ekonomi sering terjadinya putus sekolah. Karena tidak sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang mau melamar akan langsung diterima tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke

depannya. Padahal dengan pendidikan, kehidupan anak akan menjadi jauh lebih baik. Sudah menjadi kewajiban orang tua agar anak mendapatkan pendidikan yang layak, seberat apapun masalah yang dihadapinya.³⁵

4. Hamil Sebelum Nikah

Hamil di luar nikah dapat disebabkan karena pergaulan bebas. Anak perempuan yang telah hamil mengakibatkan orang tua lebih cenderung untuk menikahkan anaknya. Bahkan jika orang tua pada dasarnya tidak menyukai anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang akan menjadi menantunya, maka dengan terpaksa menikahkan. Atau dalam kasus lain anak perempuan tersebut tidak menyukai laki-laki yang akan dinikahkannya, tetapi karena telah hamil maka dengan sangat terpaksa mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan.

Keadaan seperti ini orang tua dengan terpaksa harus menikahkan anaknya, meskipun pernikahan yang seperti ini jelas bukan pernikahan yang dianjurkan undang-undang atau norma agama. Tujuan untuk pernikahan itu sendiri ialah menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah artinya saling mencintai dan menyayangi. Tetapi jika pernikahan yang didasari cinta saja mudah goyah, apalagi pernikahan yang dilaksanakan dalam keadaan dipaksakan.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa bila wanita yang hamil di luar nikah akan dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pasangan zinanya, maka pernikahan tersebut hanya boleh dilaksanakan bila wanita yang hamil dari hasil zina itu telah melahirkan.

³⁵ Aksewmsaudi, “Faktor Pernikahan Dini dan Solusinya”
<https://aksewmsaudi.wordpress.com/2012/04/17/faktor-pernikahan-dini-dan-solusinya> (9 Mei 2016).

Namun, bila dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pasangan zinanya, maka para ulama bersilang pendapat: “Boleh (sah) nikah di saat hamil dan boleh juga langsung bergaul sebagaimana lazimnya suami isteri. Menurut hukum Imam Hanafi, akad nikahnya memang sah, namun keduanya untuk sementara belum boleh bergaul hingga isterinya melahirkan dan selesai masa nifasnya. Sementara itu Imam Malik, Ahmad bin Hambal dan para ulama Madinah berpendapat, “Tidak boleh dilangsungkan pernikahan walaupun dengan pasangan zinanya kecuali setelah si wanita melahirkan dan selesai masa nifasnya.”³⁶

5. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor dari penyebab pernikahan di usia dini. Keluarga yang kurang mampu dari segi keuangan akan memikirkan bagaimana cara membiayai hidupnya agar lebih terjamin. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).³⁷ Jika mereka mempunyai seorang anak gadis, mereka tanpa berpikir panjang akan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah mapan. Meskipun dalam hal ini anak gadis tersebut belum cukup umur atau belum mampu dari segi kesiapan jiwanya. Dengan menikahkan anaknya maka orang tua akan terlepas dari beban untuk membiayai anak mereka.

³⁶Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 420 - 421.

³⁷Syamsuddin, “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h.47.

6. Faktor Adat dan Budaya

Faktor adat yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi adanya pernikahan usia dini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai adat yang ada di daerah-daerah tertentu. Salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya yaitu karena orang tua takut anaknya kelak menjadi perawan tua, agar tidak terjadi hal demikian ketika anaknya telah baligh maka mereka menikahkan anaknya sesegera mungkin.

Misalnya di desa Tanah Towa, perkawinan di bawah umur sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Dalam tradisi mereka, anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapat jodoh, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Oleh karena itu orang tua memotivasi kepada anaknya untuk segera menikah.³⁸

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan di masyarakat pernikahan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya batasan usia pernikahan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan.³⁹

F. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan

Pernikahan usia dini lebih berdampak pada kesehatan wanita yang masih terlalu muda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi. Kehamilan dan persalinan bagi remaja perempuan mempunyai pengaruh yang dalam

³⁸Udma Laela, "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), h. 41.

³⁹Dwi Rezki Wahyuni, "Dispensasi terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 90.

dan berkepanjangan terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan kemampuannya untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

Dampak bagi kesehatan reproduksi sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seseorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan dimulainya menstruasi. Pematangan rahim dapat pula dilihat dari perubahan ukuran rahim secara anatomis. Pada seorang wanita, ukuran rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal.⁴⁰

Pada seorang anak berusia kurang dari 8 tahun, ukuran rahimnya kurang lebih hanya setengah dari panjang vaginanya. Setelah umur 8 tahun, ukuran rahimnya kurang lebih sama dengan vaginanya. Hal ini berlanjut sampai usia kurang lebih dari 14 tahun (masa menstruasi) hingga besar rahimnya lebih besar sedikit dari ukuran vaginanya. Ukuran ini menetap sampai terjadi kehamilan. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat rupture (robek). Di samping itu, penyangga rahim juga belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan sehingga resiko yang lain dapat juga terjadi yaitu *prolapsus uteri* (turunnya rahim ke liang vagina) pada saat persalinan.⁴¹

⁴⁰ Aisyah, “Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang)”, *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2015), h.41.

⁴¹ Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*, h. 41-42.

Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari siklus menstruasi yang belum teratur. Ketidakteraturan tersebut dapat berdampak jika terjadi kehamilan yaitu kehamilan menjadi tidak stabil, mudah terjadi pendarahan, kemudia abortus dan kematian janin. Usia kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia produktif aktif. Hal ini dapat meningkatkan resiko kanker leher rahim di kemudian hari.

Wanita pada kehamilan pertamanya ketika berusia 17 tahun, kemungkinan dua kali lebih beresiko terkena kanker serviks di usia tuanya nanti, dibanding wanita yang menunda kehamilan hingga berusia 25 tahun atau lebih tua. Insiden kanker serviks lebih sering terjadi pada wanita yang telah menikah daripada wanita yang belum pernah menikah, terutama pada wanita yang masih terlalu muda atau yang disebut dengan koitus pertama (coitarache) dialami pada usia amat yang muda kurang dari 16 tahun.

- Kematian bayi dan abortus

Kejadian ini dua sampai tiga kali lebih tinggi pada kelompok usia dini daripada wanita berusia lebih dari 25 tahun karena remaja cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada wanita dewasa. Remaja juga memiliki resiko lebih besar mengalami kondisi yang berhubungan dengan masalah kehamilan misalnya hipertensi kehamilan.⁴²

- Keracunan kehamilan

Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan kehamilan dalam bentuk Eklamasi dan Pre

⁴² Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*, h. 42.

eklamasi. Pre eklamasi dan eklamasi memerlukan perhatian khusus karena dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga dapat menyebabkan persalinan menjadi lama dan sulit. Persalinan lama dan sulit adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebabnya yaitu kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, atau mengejan yang salah. Adapun anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan kadar hemoglobin darah kurang dari 11 gr/Dl.⁴³

Cacat bawaan merupakan kelainan pertumbuhan struktur organ janin sejak saat pertumbuhan. Kehamilan usia terlalu muda dapat menimbulkan pertumbuhan janin dalam kandungan kurang sempurna, persalinan sering diakhiri dengan tindakan operasi, pulihnya alat reproduksi setelah persalinan berjalan lambat, pengeluaran ASI tidak cukup.

Kondisi mental yang cenderung labil dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi psikologi anak, apalagi bila belum memiliki pengetahuan mendalam tentang perkawinan dari kehidupan berumah tangga, termasuk semua hak dan kewajiban yang akan dijalani setelah pernikahan. Pernikahan dini juga diklaim sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga karena cara berpikir mereka yang belum siap atau dewasa memasuki dunia perkawinan.

G. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan

⁴³ Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*, h. 43.

istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba-in”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.⁴⁴

Perceraian berasal dari kata cerai yang mendapat imbuhan per. Cerai menurut bahasa berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri.⁴⁵ Jadi perceraian adalah putusanya ikatan pernikahan antara suami isteri karena alasan-alasan tertentu.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau furkah. Adapun arti talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yakni lawan dari berkumpul. Kemudian kata tersebut dipergunakan oleh ahli fiqh sebagai salah satu istilah yang memiliki arti perceraian antara suami istri.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan karena 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

a. Kematian

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189.

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261.

⁴⁶ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 103.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, sebagai suami isteri.
6. Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama murtad atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁸

Berdasarkan kompilasi hukum islam, dapat dilihat berbagai alasan perceraian terjadi. Selain faktor-faktor di atas, perceraian juga dapat terjadi pada pasangan muda yang belum siap memasuki dunia pernikahan.

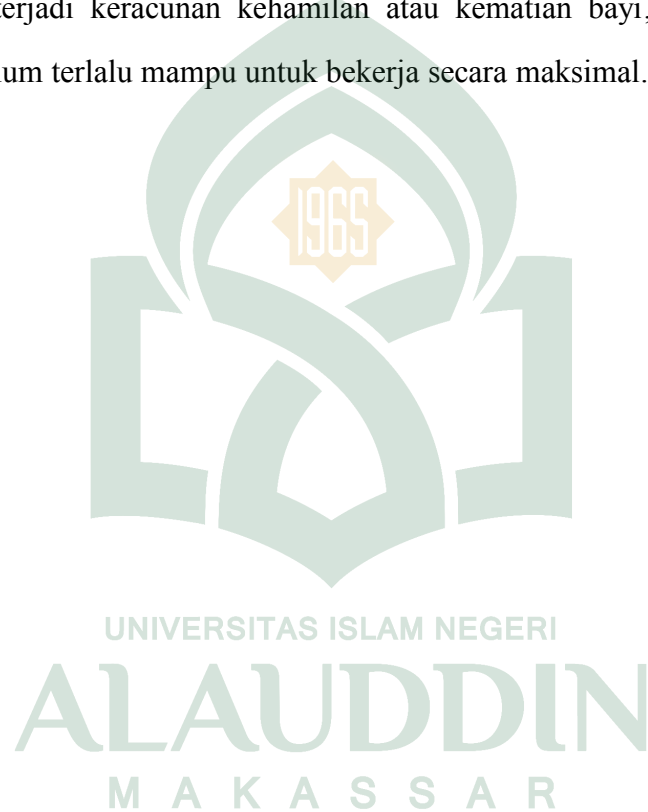
Kurang siapnya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangganya banyak disebabkan karena faktor umur dan penguasaan

yang demikian minimnya. Kesiapan wanita untuk mengandung demikian tipisnya disebabkan oleh usia yang rata-rata 13-15 tahun senantiasa menjadi penyebab meningkatnya kematian bayi setelah seorang gadis mulai haid bukan berarti secara jasmani sudah siap untuk memproduksi. Biasanya masih berlangsung beberapa tahun lagi, sebelum proses pubertas selesai.⁴⁹

⁴⁸Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, bab XVI, pasal 116.

⁴⁹Fatmawati, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008) h. 17-18.

Pada pasangan suami isteri usia muda belum mencapai tingkat kedewasaan baik secara psikis maupun fisik. Kegagalan rumah tangga pada usia muda ini sangat memungkinkan terjadi, itu karena jiwa mereka belum cukup mampu untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam dunia pernikahan. Selain itu bagi wanita muda yang telah hamil setelah pernikahan, sangat memungkinkan terjadi keracunan kehamilan atau kematian bayi, karena kesiapan rahim mereka belum terlalu mampu untuk bekerja secara maksimal.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.¹ Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa banyak permohonan dispensasi yang diajukan dan dikabulkan oleh majelis hakim, dan perceraian setelah adanya dispensasi nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan sosiologis.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

1. Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain.
2. Teologi normatif dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai dispensasi nikah atau perkawinan di bawah umur yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang berkaitan.
3. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari Pengadilan Agama Watampone kelas 1B.
2. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sejenisnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang

berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Imam Suprayogo (2001,172) wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden. Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Antara lain:

- a. Hakim Pengadilan Agama Watampone.
- b. Panitera Pengadilan Agama Watampone.
- c. Pegawai negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Watampone.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip-arsip Pengadilan Agama Watampone.

3. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.³ Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama Watampone kelas IB dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan hal ini.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 136.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perlu adanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁴ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.
2. Dukumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 101.

mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Profil Pengadilan Agama Watampone*

➤ Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Watampone

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1985. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K. H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut:

1. H. Muh. Yusuf Hamid;
2. H. Abd. Hamid Djabbar;
3. H. Hamsah mappa;
4. H. Muh. Said Syamsuddin

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu, berkantor pada sebuah rumah pinjaman di jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama.

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di jalan Laksmana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 48 orang.

Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Watampone. Pengadilan Agama Watampone adalah termasuk dalam wilayah Watampone. Wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Watampone, dengan luas wilayah 4.559 km² yang terdiri dari 27 kecamatan dan 34 kelurahan serta jumlah penduduk 705.717 jiwa.

➤ Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Watampone Yang Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
3. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)

4. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
6. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

➤ Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi :

" mewujudkan pengadilan agama watampone yang agung "

Misi :

1. "mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi"
2. "meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat"

3. "melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien"
4. "melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien"
5. "mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

➤ Daftar Riwayat Hidup Hakim & Karyawan Pengadilan Agama Watampone
Klas 1A

Ketua : Drs. Hasbi, M.H.

Wakil Ketua : Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.,M.H.

Hakim : Hj. Sumrah, S.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Nurmiati, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H. Ramli Kamil, M.H.

Drs. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Andi Asni Hamzah, M.H.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Husniwati

Dra. Hj. St. Masdanah

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Kepaniteraan :

Panitera : Kamaluddin, S.H., M.H.

Wakil Panitera : Dra. Rosdiana

Panitera Muda Permohonan : Dra. Muliati

Panitera Muda Hukum : Drs. Jamaluddin

Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Munirah

Panitera Pengganti : Dra. Hunaena

Dra. Hj. Rosmini

Drs. Rustan, S.H.

Dra. Wakiah

Dra. St. Naisyah

Dra. Samsang

Asmawi, S.Ag.

Bintang, S.H.

Dra. Nuraeni.

Siti Jamilah, S.H.

Jurusita / Jurusita Pengganti :

Muhammad Suardi, S.H.

Muhammad Syahrani, S.H.

Ridmajayanti, S.Sos.

Heriawati

Kesekretarian :

Sekretaris: H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.

Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Hj. Asmah, S.H.

Kasubbag Umum & Keuangan : Nurhidayah, S.Ag.

Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan : Maftukhah Mustafa, S.K

Staf : Agustiwati

B. Faktor-Faktor yang Mendasari dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim mengenai Dispensasi Nikah

Undang-undang membatasi usia dari calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat, sehingga tujuan dari undang-undang memberikan dispensasi nikah dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Dispensasi nikah merupakan permohonan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau izin bagi pihak yang hendak menikah oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Namun

dalam hukum Islam usia perkawinan tidak dibatasi, justru memicu kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami isteri tersebut.

Adanya batasan pernikahan diadakan untuk membatasi pernikahan liar bagi anak-anak yang masih di bawah umur dimana mereka yang asyik dengan dunia bermainnya. Perlu adanya batasan umur untuk menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan sudah cukup sempurna.

Dispensasi nikah dalam undang-undang dapat membatasi tingkat pernikahan di bawah umur yang belum cukup matang. Selain itu mengenai tinjauan sosialnya, dalam hal ini sebagai pelayanan hak asasi dan publik, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup umur, serta adanya kepastian dalam pernikahan.

Jumlah data permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Watampone yaitu sebanyak 120 pasangan. Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan selama tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1: Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2016

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	6
Februari	14
Maret	13
April	6
Mei	10

Juni	-
Juli	3
Agustus	9
September	19
Oktober	13
November	12
Desember	15
Jumlah keseluruhan tahun 2016	120

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Watampone memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan adanya 120 pasangan yang hendak menikah di usia muda pada tahun 2016, diluar mereka yang belum dikabulkan dan yang ditolak.

Menurut hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Watampone mengenai faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan oleh mereka dalam mengabulkan dispensasi nikah terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Sesuai dengan aturan formil

Pernikahan yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Namun adanya persyaratan mengenai batasan umur minimal untuk melankukan perkawinan tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi, dimana dispensasi tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam untuk dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan, meskipun batas minimal usia kawin belum tercapai. Pemberian izin tersebut terdapat dalam lanjutan dari pasal Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang berbunyi “Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.¹

2. Domisili

Pengabulan dispensasi nikah di pengadilan agama harus masuk dalam lingkup wilayah hukum tempat berdomisili. Daerah pemohon yang mengajukan dispensasi nikah termasuk dalam daerah yuridiksi pengadilan agama yang bersangkutan. Jika pemohon bertempat tinggal di daerah watampone maka yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama Watampone.

3. Tidak adanya larangan pernikahan

Setiap pernikahan yang akan dilangsungkan tidak boleh adanya larangan-larangan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang. Larangan-larangan yang ada dalam pernikahan termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Begitupun dalam hal dispensasi nikah, jika larangan-larangan pernikahan

¹ Rizka Fakhry Alfiananda, *Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)*
http://www.dokumen/proposal/Dispensasi.KawinSebuahAnalisisTerhadapPutusanPengadilanAgamaMuaraEnimNomor04_Pdt.P_2012_PAMEAudio,Video,Facio,Intellego.html (9 April 2017).

tersebut ada maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua pihak yang akan menikah.

4. Kematangan dari segi sikap maupun finansial.

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya apabila pihak-pihak yang akan menikah telah cukup matang menghadapi dunia pernikahan yang lebih rumit ketimbang masih dalam pengawasan orang tua. Hakim akan memberikan pertanyaan kepada kedua pihak mengenai kesiapan mereka menghadapi dunia pernikahan. Selain itu hakim akan memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa pernikahan usia muda tidak begitu mudah karena menikah di usia muda menanggung resiko yang berat apalagi baik dari segi psikis maupun dari segi biologis, serta para pihak yang terlibat dengan dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak dan kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah.

Hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.²

Mampu dari segi finansial juga sangat perlu diperhatikan. Anak laki-laki yang belum cukup umur ingin melangsungkan pernikahan nantinya harus mampu membiayai keluarga mereka sendiri. Karena beralihnya kewajiban orang tua anak perempuan kepada calon suaminya kelak, maka calon mempelai pria baik yang sudah dewasa, apalagi dia yang belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya sendiri setelah menikah.

²Dwi Rezki Wahyuni, "Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru", *Skrispi* (Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009), h. 83.

5. Keinginan atau persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang ingin menikah harus keinginan atau persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan persidangan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus hadir, untuk mengetahui apakah kedua belah pihak yang ingin menikah benar-benar keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hakim harus mendengar keterangan langsung dari mereka yang ingin menikah. Jika mereka menikah karena paksaan akan berpengaruh nantinya bagi pernikahan mereka kelak, apalagi di usia mereka yang belum dewasa, sangat rentan mengalami pertengkaran. Dan apabila hakim mengetahui bahwa kedua pihak yang akan menikah bukan karena keinginan mereka atau adanya pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan pernikahan maka hakim akan menolak permohonan dispensasi tersebut.

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*³. Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.⁴

³Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 16.

⁴Dwi Rezki Wahyuni, “Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru”, *Skrispi* (Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009), h. 83-84.

6. Dalam keadaan terdesak

Setiap hakim yang hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah. Hakim akan mengabulkannya jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak di sini misalnya si wanita tersebut telah hamil, kedua pihak yang akan menikah sudah terlalu dekat menjalin hubungan, atau mereka sudah terlalu lama menjaling hubungan sebagai pasangan kekasih, dan dispensasi ini tidak diberikan jika diketahui mereka yang hendak menikah ada paksaan dari pihak lain.

7. Masalah mursalah

Selain alasan-alasan di atas, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ini adalah apakah permohon dispensasi nikah ini akan berdampak positif di kemudian harinya atau tidak, kembali ke masalah mursalahnya.

Pengertian “Maslahah Mursalah” secara etimologis terdiri atas dua suku kata yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah.⁵ Sedang Mursalah berasal dari kata *ارسل* yang berarti terlepas atau bebas. Jadi bila kata “maslahah”

⁵W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M, hal. 324.

digabungkan dengan “mursalah”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.⁶

Adapun pengertian secara istilah menurut pendapat ulama Imam Al-Razi, mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai perbuatan yang manfaat sebagaimana yang diperintahkan oleh Musytari’ (Allah) kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta bendanya.⁷ Jadi masalah musralah ialah semua yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan bagi manusia dan menghindarkan semua yang memungkinkan terjadi kemudaratn atau kerusakan.

Dalam Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

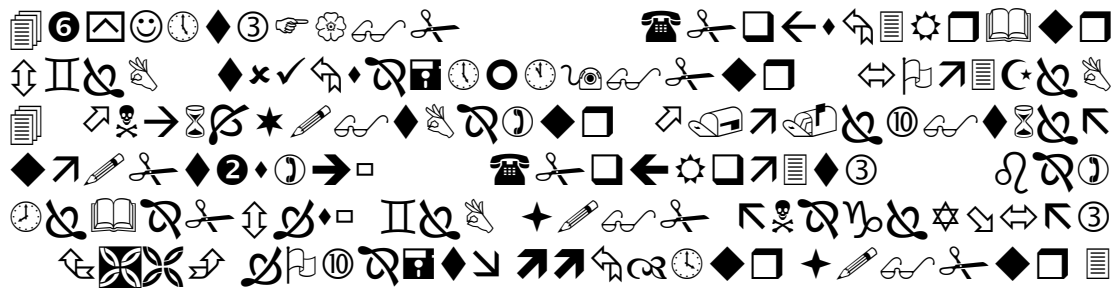
“Menolak Mafsahat lebih diprioritaskan menarik maslahatnya”

Adapun masalah mursalah dalam alasan pengabulan permohonan dispensasi nikah ini, bahwa hakim mengabulkannya karena adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, disebabkan sang anak sudah terlalu lama dan dekat dengan pasangannya. Selain itu, kehendak keduanya ataupun pihak keluarga sudah terlalu kuat dan sangat mendesak untuk menikahkan kedua calon pasangan suami isteri tersebut, sehingga hakim dengan pertimbangan yang ada mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nur (24) ayat 32:

⁶Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 332

⁷www.yasinamka.blogspot.co.id/2015/02/relefansi-mashlahah-mursalah-sebagai. Diakses pada tanggal 7 April 2017.



Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Setiap dalam persidangan majelis hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah sering memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa pernikahan usia muda tidak semuda dan sebahagia yang difikirkan, walaupun telah halal tinggal bersama pasangannya. Mereka harus menanggung resiko yang berat apalagi dari segi psikis maupun biologis meskipun belum cukup matang dari segi usia. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi nikah ini, baik orang tua maupun kerabat-kerabat dekat kedua pihak yang ingin menikah, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah. Dan beberapa nasehat-nasehat perkawinan lainnya.

Pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda, meskipun telah mendapat pengertian dan nasehat-nasehat mengenai perkawinan, tanggapan mereka tetap bertahan ingin menikah di usianya tersebut. Alasannya sebagian orang tua mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dilaksanakan dengan segera. Selain itu, beberapa keluarga atau orang tua kedua pihak yang ingin menikah

⁸Kmentrian Agama R. I., *Al-Qur'an terjemahnya*, Surah an-Nisa/24: 32 (Jakarta: Toha Putra, 2008).

akan merasa malu, jika anaknya tidak jadi menikah, karena telah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat di daerah kedua pihak tersebut.

Dispensasi nikah yang dikabulkan di pengadilan agama pada kehidupan pihak-pihak yang menikah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mencegah yang namanya perzinahan karena jika permohonan dispensasi telah dikabulkan maka pihak-pihak yang belum cukup umur dapat melangsungkan pernikahan secara sah baik di mata hukum maupun agama. Namun di sisi lain dispensasi nikah yang dikabulkan bagi kedua pihak sangat rentan mengalami perselisihan karena di usia mereka yang cukup muda tentunya memiliki pemikiran yang berbeda dengan mereka yang telah dewasa.

C. Fenomena Tingkat Perceraian akibat Pernikahan Usia Dini di Pengadilan Agama Watampone

Perceraian akibat pernikahan usia dini merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah, terkhusus sendiri di wilayah Watampone itu sendiri. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan berdasarkan putusan yang ada dan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai kasus ini.

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone terjadi cukup banyak dari tiap-tiap tahunnya. Jumlah perkara pertahunnya hingga mencapai ribuan. Adapun data-data perceraian yang ditemukan oleh peneliti di pengadilan Agama Watampone selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2: Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pada Tahun 2016.

Bulan	Jumlah perkara
Januari	68
Februari	114
Maret	134
April	73
Mei	93
Juni	84
Juli	69
Agustus	84
September	116
Oktober	114
November	121
Desember	112
Jumlah keseluruhan tahun 2016	1182

Data-data yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone selama kurung waktu 2016 yaitu 1182 kasus perceraian. Data perceraian tersebut merupakan keseluruhan data cerai gugat dan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Dalam hal ini berarti perceraian di wilayah Watampone itu sendiri cukup banyak terjadi dibanding wilayah-wilayah lainnya yang ada di Sulawesi selatan.

Perceraian akibat pernikahan usia muda merupakan perceraian yang di alami mereka yang belum cukup umur, dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah, kemudian lantas tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah menikah meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik wanita belum mencapai umur 16 tahun atau laki-laki belum 19 tahun, jika telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua.

Fenomena perceraian yang terjadi akibat menikah di usia dini cukup banyak diajukan di Pengadilan Agama Watampone. Majelis hakim mengatakan bahwa tidak ada alasan perceraian karena pernikahan di bawah umur, tetapi yang ada hanya karena alasan zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan karena faktor ekonomi. Akan tetapi diantara alasan-alasan tersebut beberapa terjadi di pernikahan usia dini. Misalnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pihak-pihak yang belum cukup umur, memiliki kepribadian yang masih labil, sehingga sangat mudah berselisih dengan pasangan.

Tabel 4.3: Persentase Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A di Tahun 2016.

Alasan Perceraian	Jumlah Persentasi
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	24.96%
Meninggalkan salah satu pihak	15.79%
Ekonomi	13.38%
Mabuk	6.91%
Poligami tidak sehat	6.01%
KDRT	5.86%
Cacat Badan	5.56%
Tidak Tanggung Jawab	3.91%
Kawin Paksa	3.01%
Krisis Moral	3.01%
Judi	1.95%
Menyakiti jasmani	1.35%
Selingkuh	1.20%
Dihukum penjara	0.60%
Cemburu	0.60%
Lain-lain	5.86%

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas menunjukkan bahwa alasan perceraian pada umumnya yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, alasan ekonomi, poligami tidak sehat, KDRT, cacat badan tidak

adanya tanggung jawab, kawin paksa, krisis moral, judi, menyakiti jasmani, selingkuh, dihukum penjara, cemburu, dan lain-lain. Adapun alasan yang paling banyak terjadi yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara kedua pihak.

Menurut beberapa hakim yang ada di pengadilan agama watampone, mereka biasa menemukan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah. Di antaranya permohonan dispensasi nikah yang diajukan setelah satu atau dua tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan menikah, salah satu pihak dari mereka mengajukan lagi gugatan perceraian. Hakim mengatakan bahwa mereka mengajukan dispensasi karena beberapa alasan, contohnya tidak adanya cinta, atau telah ada campur tangan keluarga dalam hal ini adanya paksaan ketika mereka hendak dinikahkan.

Menurut pendapat dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone beberapa kasus yang ditemukan mengenai perceraian akibat pernikahan usia dini, ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah mengatakan bahwa alasan ingin menikah karena keduanya telah saling mencintai. Namun, setelah dikabulkan mereka yang kemudian mengajukan perceraian dengan alasan adanya paksaan dari orang tua ketika ingin menikah sehingga tidak adanya rasa sayang menyayangi dalam hidup berumah tangga. Ini berarti adanya ketidakjujuran dalam hal memberikan jawaban ketika hakim memberikan pertanyaan kepada mereka.

Menurut hakim di Pengadilan Agama Warampone yang pernah menangani kasus perceraian akibat menikah usia muda rata-rata alasan pengajuan mereka yaitu sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab, baik lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi. Kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan jika berhubungan dengan ketidakmampuan suami dalam membiayai kehidupan keluarganya. Suami yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan sulit menafkahi isteri dan anaknya. Sehingga masalah ini bisa menjadi bahan pertengkaran dalam pernikahan mereka. Atau dalam perkara lain, terkadang suami yang tidak betul-betul cinta kepada isterinya akhirnya pergi meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah kepada isterinya.
2. Suami atau isteri mudah tersinggung. Pemikiran yang belum cukup dewasa, sangat mudah mengalami pertikaian. Serta sering terjadinya kesalah pahaman antara suami isteri karena tidak didasari rasa hormat menghormati dan saling menyayangi.
3. Tidak ada komitmen untuk hidup bersama sejak awal pernikahan pada salah satu pihak atau kedua pihak. Menurut hakim alasan perceraian ini terjadi karena sejak awal pernikahan mereka tidak adanya komitmen saling menyayangi untuk hidup bersama disebabkan karena pernikahan ini atas keinginan orang tua. Orang tua yang masih kental dengan adat mereka, membuat mereka lebih mudah menikahkan anaknya di usia muda, atau mereka para orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, sangat mudah terpengaruh dengan kebiasaan atau perkataan orang lain, sehingga apabila ada yang datang melamar atau melihat anaknya sudah cukup mampu untuk menikah sangat mudah menerima lamaran dan menikahkannya, walaupun sang anak belum cukup umur untuk menikah.
4. Kepribadian anak yang masih labil. Anak- anak yang menikah di usia muda tentunya kurang menikmati masa remaja mereka. Di usia tersebut rata-rata anak

pada umumnya sibuk dengan dunia pendidikan, bercengkrama dengan teman sejahwatnya, atau berpergian ke tempat-tempat yang menarik bersama teman-temannya. Namun jika sang anak telah menikah mereka harus berhadapan dengan urusan rumah tangga. Sehingga terkadang anak sulit mengontrol emosi sendiri ketika berhubungan dengan urusan rumah tangga, dan akhirnya memutuskan untuk keluar mencari jati dirinya di dunia luar, meskipun sebagian besar anak yang telah menikah tidak melakukan hal demikian.

5. Faktor pendididkan. Salah satu pasangannya sering keluar malam, dengan alasan kerja tugas sekolah. Meskipun di sisi lain hal ini merupakan kegiatan positif yang dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya isteri. Tetapi jika sang suami tidak terima ketika isterinya sering keluar malam, dan tidak mengurus keperluan rumah tangga, maka hal ini menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi pertikaian di dalam rumah tangga. Meksipun kasus ini sangat jarang terjadi, tetapi menurut salah satu hakim, hal ini pernah terjadi dalam kasus perceraian dan diajukan di Pengadilan Agama Watampone.
6. Faktor kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang menyebabkan kemajuan dalam berkomunikasi pun menjadi sangat mudah. Sejauh apapun jarak antara seseorang dengan orang lain, dapat berkomunikasi dengan mudah, tidak hanya melalui pesan, mendengar suara, bahkan dapat berkomunikasi dengan mendengar suara dan bertatapan wajah. Hal ini dapat kita jumpai dari berbagai aplikasi yang ada dan telah beredar di masyarakat, seperti facebook, twitter, e-mail, BBM, line, whatsapp, instagram, dan lain sejenisnya. Teknologi dalam komunikasi juga memudahkan seseorang untuk memperbanyak teman dari berbagai daerah. Semakin berkembangnya jaringan komunikasi, semakin besar

pula kemungkinan peluang mereka yang telah menikah menyalahgunakan fasilitas ini untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Apalagi jika mereka memiliki sifat yang cenderung tidak setia, sehingga lebih mudah hadirnya pihak ketiga.

Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia mudah, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Watampone yaitu dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4: Perceraian Akibat Menikah di Usia Muda.

No. Perkara	Umur Pihak-pihak ketika menikah	Tahun Pernikahan	Tahun Perceraian	Alasan Perceraian
1083/Pdt.G/2016/PA.Wtp	Pria: 19 tahun Wanita: 16 tahun	2013	2016	- Selingkuh - Pemabuk - Penjudi
1077/Pdt.G/2016/PA.Wtp	Pria: 21 tahun Wanita: 16 tahun	2010	2016	- sering marah dan menganiaya istri - tidak memberi nafkah
05/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 22 tahun Wanita: 14 tahun	2004	2016	- selingkuh - sering terjadinya perselisihan
158/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 19 tahun Wanita: 16 tahun	2012	2016	- sering berkata kasar kepada isteri
300/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 37 tahun Wanita: 13 tahun	2015	2016	- sering terjadi perselisihan - meninggalkan salah satu pihak
010/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 19 tahun Wanita: 19 tahun	2008	2016	- salah satu pihak tidak ingin tinggal bersama - sering terjadi perselisihan
0048/Pdt.G/2	Pria: 19 tahun	2014	2016	- salah satu pihak

016/PA.Wtp.	Wanita: 17 tahun			meninggalkan pihak lain - selingkuh
460/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 19 tahun Wanita: 20 tahun	2012	2016	- sering terjadi perselisihan - masing-masing pihak tidak ingin tinggal bersama orang tua pihak lain.
474/Pdt.G/2016/PA.Wtp.	Pria: 24 tahun Wanita: 16 tahun	2012	2016	- meninggalkan salah satu pihak - tidak memberi nafkah lahir kepada isteri

Data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya. Data alasan perceraian yang peneliti temukan paling banyak ialah mereka bercerai karena sering terjadi perselisihan diakibatkan tidak adanya kecocokan di antara keduanya, hingga akhirnya mereka meninggalkan salah satu pihak.

Beberapa kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Watampone, memang menunjukkan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Beberapa majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah mereka karena beberapa alasan tertentu, dengan selalu mempertimbangkan masalah mursalahnya. Namun jika terjadi perceraian maka majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut.

Menurut hakim Dra. Hj. Andi Asni Hamzah, M.H., Ia mengatakan bahwa alasan hakim mengabulkan perceraianya karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak saling menyayangi. Sehingga para hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali karena rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan cukup sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun para hakim telah melakukan mediasi atau memberikan nasehat akibat-akibat yang terjadi setelah adanya perceraian.

Salah satu hakim yang telah menjabat selama kurang lebih tiga tahun menangani berbagai kasus perkara di Pengadilan Agama Watampone, bahwa perkiraan mereka yang menikah di usia dini yang bertahan kurang lebih 40%, sedang yang mengalami perceraian sekitar 60%. Hal ini menunjukkan perceraian yang terjadi setelah menikah di usia muda cukup tinggi terjadi di wilayah Watampone sendiri.

Proses perceraian di Pengadilan Agama Watampone yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, majelis hakim akan melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah menikah di usia muda. Majelis hakim mengatakan data-data yang menjadi alasan perceraian di usia muda itu biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi di usia yang telah matang. Proses perceraianya pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ialah karena sesuai dengan syarat formil yang berlaku sebagaimana yang tertera di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, domisili atau tempat kediaman yang hendak mengajukan dispensasi nikah harus sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut, tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang hendak menikah telah matang dari sikap maupun finansialnya, keinginan keduanya untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya jika masalahnya lebih besar dibanding kemudaratannya.

Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau isteri mudah tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah di usia muda masih labil

sehingga sering terjadi perselisihan di antara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk bersekolah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai skripsi ini ialah:

1. Adanya dispensasi nikah meskipun dibolehkan oleh Undang-Undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi oleh hakim sebaiknya tidak dengan mudah dikabulkan, diperlukan nasehat-nasehat yang lebih tentang hakikat pernikahan atau masalah-masalah yang akan dihadapi ketika memasuki dunia keluarga sesungguhnya, memberikan pengertian tentang tanggung jawab suami mapun isteri, dan perlu adanya kematangan jasmani mapun rohani dari kedua pihak, agar tidak terjadinya perselisihan berkepanjangan di suatu hari nanti dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak kelak, ketimbang harus menikahkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya kelak.
3. Pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun sebaiknya orang tua tidak dengan mudah menikahkan anaknya di usia yang belum matang, sebab jika pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya nanti harus bercerai maka tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama R. I. *Alqur'an terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 2008.
- Aisyah, "Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*. Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2015.
- Akswemsaudi. "Faktor Pernikahan Dini dan Solusinya". <https://akswemsaudi.wordpress.com/2012/04/17/faktor-pernikahan-dini-dan-solusinya> (9 Mei 2016).
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Amir, Hendra Fahrudin. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Audim, Moh Fauzil Audim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Basir, Ahmad Ahzar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. VII; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Da'i, Athian Ali Moh. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatmawati, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008)
- Al-Hadhrani, Salim Bin Smeer. *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Hadi, Sutrisno *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kristiyanto, Dana. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi'I". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- al-Kurdi, Najmuddin Amin. *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th.,
- Laela, Udma. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mujieb, M. Abdul. Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2011.
- Musdalifa, "Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa", *Skripsi*. Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998.
- Nurbayanti, "Dispensasi dalam Perkawinan di bawah Umur pada pengadilan Agama Takalar", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin,
- Nursyamsi, Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum islam), *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.
- Orchid, Qury. "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)". <http://www.repository.unhas.ac.id.html> (4 Juli 2013).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sabri, Samin, *Fiqih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Islamika, 2003.
- ash-Shidiqi, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Solechan. "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Sosroroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsuddin, "Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013).
- Syamsumarling, "Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene)", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLAS I.B
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018
WATAMPONE KODE POS 92715

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A2/ 1862 / PB.00/ IX /2016

Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas I B, menerangkan bahwa :

Nama : **Ummu Kalsum**
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 10100113146
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar
Alamat : Perumahan Bosowa Indah Blok O No. 12

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul :

**“ DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA WATAMPONE KLAS I. B “**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Watampone, 19 September 2016
Ketua,



Drs. Hasbi, M.H.
NIP. 19591231 198803 1 025



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No 49 A Tlp. (0481) 21018
WATAMPONE

KETERANGAN WAWANCARA

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Makmur, M.H.

Tempat tanggal Lahir : Tanete , 31 Desember 1962.

NIP : 196212311991031046.

Jabatan : Hakim.

Menerangkan bahwa :

Nama : Ummu Kalsum.

NIM : 10100113146.

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Peradilan Agama.

Menerangkan bahwa bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone .

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Watampone, 15 September 2016.

Pewawancara

Drs. Makmur, M.H



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No 49 A Tlp. (0481) 21018
WATAMPONE

KETERANGAN WAWANCARA

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H

Tempat tanggal Lahir : Pare-Pare , 02 Oktober 1961

NIP : 196110021988032001.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa :

Nama : Ummu Kalsum.

NIM : 10100113146.

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Peradilan Agama.

Menerangkan bahwa bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone .

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Watampone, 16 September 2016.

Pewawancara

Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No 49 A Tlp. (0481) 21018
WATAMPONE

KETERANGAN WAWANCARA

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jamaluddin Rahim
Tempat tanggal Lahir : Watampone, 12 April 1962
NIP : 196204121992031006
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Menerangkan bahwa :
Nama : Ummu Kalsum.
NIM : 10100113146.
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Peradilan Agama.

Menerangkan bahwa bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone .

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 14 September 2016.

Pewawancara

Drs. Jamaluddin Rahim



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No 49 A Tlp. (0481) 21018
WATAMPONE

KETERANGAN WAWANCARA

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Rosmini

Tempat tanggal Lahir : Uloe, 12 April 1967

NIP : 196704121994032002.

Jabatan : Panitera Pengganti

Menerangkan bahwa :

Nama : Ummu Kalsum.

NIM : 10100113146.

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Peradilan Agama.

Menerangkan bahwa bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone .

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Watampone, 16 September 2016.

Pewawancara

Dra. Hj. Rosmini .

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama R. I. *Alqur'an terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 2008.
- Aisyah, "Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*. Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2015.
- Akswemsaudi. "Faktor Pernikahan Dini dan Solusinya". <https://akswemsaudi.wordpress.com/2012/04/17/faktor-pernikahan-dini-dan-solusinya> (9 Mei 2016).
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Amir, Hendra Fahrudin. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Audim, Moh Fauzil Audim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Basir, Ahmad Ahzar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. VII; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Da'i, Athian Ali Moh. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatmawati, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008)
- Al-Hadhrani, Salim Bin Smeer. *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Hadi, Sutrisno *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Kementrian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kristiyanto, Dana. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi'I". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- al-Kurdi, Najmuddin Amin. *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th.,
- Laela, Udma. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mujieb, M. Abdul. Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2011.
- Musdalifa, "Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa", *Skripsi*. Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998.
- Nurbayanti, "Dispensasi dalam Perkawinan di bawah Umur pada pengadilan Agama Takalar", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin,
- Nursyamsi, Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum islam), *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.
- Orchid, Qury. "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)". <http://www.repository.unhas.ac.id.html> (4 Juli 2013).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sabri, Samin, *Fiqih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Islamika, 2003.
- ash-Shidiqi, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Solechan. "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Sosroroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsuddin, "Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013).
- Syamsumarling, "Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene)", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



RIWAYAT HIDUP

Ummu Kalsum lahir di Kolaka pada tanggal 25 September 1995. Anak pertama dari dua bersaudara, lahir dengan kasih sayang dari pasangan Drs. H. Takwin Mangka dan Dra. Hj. Rosmini.

Mulai mengesap pendidikan di TK Al-Muhajirin Kelurahan Kolaka Kabupaten Kolaka pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 1 Laloeha Kolaka selama enam tahun dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs Negeri Kolaka selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan lagi pendidikannya di SMA Negeri 1 Kolaka selama satu tahun, dan pindah di MAN 2 Watampone selama 2 tahun, hingga tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun 2013, melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihannya ditetapkan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Kemudian memilih fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama. Dan atas berkat rahmat Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diprogramkan di tahun 2017.

M A K A S S A R